

ANALISIS HAMBATAN IMPLEMENTASI SIMDA BERBASIS AKRUAL PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KOTA PALANGKARAYA

Catherine Apriliani¹, Pegricia Mozza Lamanda Tahan²
catherineapriliani18@gmail.com¹, pegriciaaaa@gmail.com²
Universitas Palangka Raya

Abstrak: Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berbasis akrual merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Good Government Governance melalui transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan implementasi SIMDA berbasis akrual pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palangka Raya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi dan studi dokumentasi di BPKAD serta beberapa OPD terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SIMDA telah membantu menstrukturkan laporan keuangan, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur TI, kurangnya kompetensi teknis sumber daya manusia terkait logika akuntansi akrual, kendala koordinasi antar-unit kerja, serta tantangan stabilitas sistem selama masa transisi menuju SIPD. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan sinkronisasi kebijakan anggaran infrastruktur TI untuk menjamin integrasi data keuangan yang akurat dan akuntabel.

Kata Kunci: SIMDA, Akuntansi Akrual, Hambatan Implementasi, Transformasi Digital, Laporan Keuangan Daerah.

Abstract: The implementation of the accrual-based Regional Management Information System (SIMDA) is a strategic step toward achieving Good Government Governance through transparency and accountability in financial reporting. This study aims to analyze the obstacles in implementing accrual-based SIMDA within the Regional Apparatus Organizations (OPD) of Palangka Raya City. Using a descriptive qualitative method, data were collected through observations and documentation studies at the BPKAD and several relevant OPDs. The results indicate that while SIMDA implementation has helped structure financial reports, its effectiveness is still hindered by four main factors: limited IT infrastructure and internet connectivity, a lack of technical competence among human resources (HR) regarding accrual accounting logic, coordination hurdles between work units in data synchronization, and system stability challenges during the transition period to SIPD. This study recommends the need for strengthening HR capacity through continuous training and synchronizing IT infrastructure budget policies to ensure accurate and accountable financial data integration.

Keywords: SIMDA, Accrual Accounting, Implementation Barriers, Digital Transformation, Regional Financial Reports.

PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, dimana Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi pilar utama dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, transformasi digital ini merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung sistem pemerintah serta meningkatkan efektivitas kinerja instansi (Arief, and Yunus Abbas 2021). Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan *Good Governance* melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks manajemen keuangan daerah, instrumen krusial yang mendukung visi ini adalah penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Transformasi digital di sektor publik ini berjalan beriringan dengan pergeseran standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, seluruh entitas pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Berbeda dengan basis kas, penerapan SAP berbasis akrual secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan melalui opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai proksi kualitas laporan keuangan. Penggunaan SIMDA yang terintegrasi dengan basis akrual diharapkan mampu menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang merupakan dua unsur pokok dalam mewujudkan *good government governance*.

Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara harapan regulasi dengan realitas di lapangan. Meskipun standar tinggi telah ditetapkan, implementasi SPBE dan sistem akuntansi sering kali menghadapi banyak kendala yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam penerapannya. Fenomena yang terjadi di banyak daerah menunjukkan bahwa koordinasi yang lemah dan penataan anggaran yang kurang mendetail menjadi pemicu utama belum maksimalnya hasil yang dicapai. Di Kota Palangkaraya, tantangan dalam mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam praktik akuntansi harian masih menjadi hambatan utama dalam mencapai standar akuntabilitas yang diinginkan. Hal ini tercermin dari perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap nilai SPBE serta upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang tidak hanya sekadar administratif, tetapi juga substansial.

Berdasarkan kajian literatur, kendala penerapan sistem berbasis elektronik dan akuntansi akrual di instansi pemerintah dapat dikategorikan ke dalam empat aspek utama. Pertama, aspek Infrastruktur TI, di mana ketersediaan jaringan dan perangkat keras memadai adalah syarat mutlak sistem daring. Kedua, aspek Sumber Daya Manusia (SDM), yakni kurangnya kompetensi teknis staf pelaksana dalam memahami logika akuntansi akrual. Ketiga, Komitmen dan Budaya Organisasi, terkait dukungan manajemen puncak untuk meninggalkan budaya kerja manual. Keempat, aspek Regulasi dan Kebijakan, di mana ketidaksinkronan kebijakan lokal dengan standar nasional sering memicu kebingungan operasional di tingkat OPD.

Kelemahan dalam koordinasi antar-elemen pemerintah atau antar-OPD di Kota Palangkaraya sering kali menjadi titik kritis dalam integrasi data keuangan. Jika hambatan-hambatan tersebut tidak segera diidentifikasi dan dicarikan solusinya, maka tujuan untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel akan sulit dicapai secara berkelanjutan. Keberhasilan SIMDA pada akhirnya bukan hanya soal teknis perangkat lunak, melainkan tentang membangun kepercayaan masyarakat melalui penyediaan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan mudah diakses (Jati 2019).

Analisis Hambatan Implementasi Simda Berbasis Akrual Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Kota Palangkaraya

Hambatan utama dalam penerapan aplikasi SIMDA di Palangka Raya, khususnya dalam masa transisi menuju SIPD, umumnya berkaitan dengan proses perubahan sistem yang memerlukan penyesuaian waktu serta regulasi pendukung yang belum sepenuhnya stabil, sehingga berdampak pada keterlambatan pencairan anggaran. Selain itu, kendala juga muncul dari sisi sumber daya manusia di setiap SKPD yang masih membutuhkan pemahaman teknis lebih mendalam terhadap aplikasi baru, ditambah dengan permasalahan teknis seperti keterbatasan infrastruktur jaringan internet di beberapa wilayah serta gangguan server. Hambatan lain yang cukup signifikan adalah kesulitan dalam sinkronisasi data keuangan antara SKPD dengan BPKAD, yang pada akhirnya turut memengaruhi kelancaran proses penatausahaan dan memperlambat realisasi anggaran daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan menganalisis secara mendalam hambatan implementasi SIMDA berbasis akrual pada OPD di Kota Palangkaraya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rumusan masalah yang meliputi bagaimana proses adaptasi budaya kerja dan teknis operasional dalam implementasi SIMDA berbasis akrual di OPD Kota Palangkaraya, serta menganalisis alasan di balik faktor sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang masih menjadi kendala dominan dalam mencapai integrasi data yang ideal. Selain itu, kajian ini juga diarahkan untuk mengevaluasi bagaimana efektivitas koordinasi antar-unit kerja (*Inter-Agency Relationship*) dalam upaya meminimalkan hambatan sinkronisasi data keuangan di lingkungan pemerintah tersebut.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam alur implementasi SIMDA dan mengidentifikasi akar penyebab hambatan yang dihadapi oleh para pelaksana di lapangan.

Manfaat penelitian ini dirancang secara multidimensi untuk memberikan kontribusi pada studi Administrasi Publik melalui penguatan teori adopsi teknologi di level pemerintah daerah, sekaligus memperkaya literatur mengenai tantangan transformasi digital di wilayah non-metropolitan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi instrumen evaluasi strategis bagi BPKAD dan pimpinan OPD di Palangka Raya dalam memetakan kapasitas SDM serta perbaikan alur kerja, yang pada akhirnya menghasilkan rekomendasi konkret bagi Pemerintah Kota untuk menyinkronkan kebijakan anggaran infrastruktur TI dengan kebutuhan nyata di setiap unit kerja, selaras dengan kerangka kerja evaluasi SPBE yang disarankan oleh (Pratiwi et al. 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai analisis hambatan implementasi SIMDA berbasis akrual ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, terutama terkait hambatan teknis, sosiologis, dan organisasional dalam penerapannya. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang juga menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi SIMDA dalam pengelolaan keuangan daerah (Igirisa et al. 2022). Lokasi penelitian difokuskan pada Pemerintah Kota Palangkaraya, khususnya di BPKAD dan beberapa OPD terpilih yang merepresentasikan variasi kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kompetensi dan keterlibatan langsung dalam operasional SIMDA, seperti pejabat BPKAD, PPK-OPD, serta operator SIMDA, guna memperoleh perspektif yang beragam dan meminimalkan

bias penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi untuk mengkaji berbagai hambatan dalam implementasi sistem, seperti keterbatasan SDM, infrastruktur, serta kendala koordinasi dan regulasi. Proses analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana juga diterapkan dalam penelitian terkait SIMDA yang menekankan pentingnya tahapan tersebut dalam menghasilkan temuan yang valid (Gonibala, Tahir, and S Mooduto 2024). Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen pendukung. Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif serta memberikan rekomendasi yang relevan dalam meningkatkan efektivitas implementasi SIMDA di lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi sistem informasi dalam tata kelola keuangan daerah di Indonesia menunjukkan transformasi signifikan, meskipun tingkat efektivitasnya bervariasi. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terbukti membantu pemerintah daerah menyusun laporan keuangan yang lebih terstruktur. Sebagai contoh, evaluasi SIMDA Pendapatan di Kabupaten Mahakam Ulu menunjukkan tingkat keberhasilan mencapai 95% dalam aspek kualitas sistem (Pidang et al. 2025). Di BPKAD Kota Metro dan Kota Pekalongan, sistem ini dinilai cukup efektif meskipun masih menghadapi kendala teknis seperti gangguan koneksi dan penyajian data yang terkadang kurang akurat (Liza Maharani 2025).

Transisi menuju Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan langkah esensial untuk modernisasi tata kelola agar lebih transparan. Di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, otomatisasi melalui SIPD mempercepat tahapan perencanaan hingga pelaporan (Djafar, Rudin, and Halwi 2026). Namun, di beberapa wilayah seperti Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Kotawaringin Timur, implementasi SIPD masih dalam tahap uji coba dan menghadapi tantangan besar terkait kebutuhan modernisasi infrastruktur (Liza Maharani 2025; Triwahyuni and Fatmawati 2024). Secara nasional, efektivitas SIPD sangat bergantung pada kemampuannya dalam mendukung akurasi data keuangan (Setiyani 2025).

Dari sisi kinerja organisasi, penerapan SIMDA berpengaruh positif terhadap profesionalisme aparatur. Di Sekretariat DPRD Surakarta, kompetensi yang dibarengi penggunaan SIMDA secara signifikan meningkatkan kinerja pegawai ($t_{\text{hitung}} 2,638 > t_{\text{tabel}} 2,003$) (Irwanto, Nurlela, and Astungkara 2022). Kualitas laporan ini berbanding lurus dengan opini BPK, seperti yang terlihat di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Secara teoretis, keberhasilan sistem seperti SIMDA dan SIPD dapat divalidasi melalui model DeLone dan McLean, di mana kualitas sistem dan informasi menjadi faktor kunci kepuasan pengguna (Wahyuni 2021). Di Kabupaten Bintan, pemanfaatan sistem ini sangat membantu pengambilan keputusan strategis berdasarkan data yang tersaji. Meskipun demikian, stabilitas sistem sering kali menjadi pembeda; SIMDA Keuangan V.2.9.0.9 dinilai lebih stabil untuk transaksi harian, namun integrasi dalam SIMDA-Next Generation (SIMDA-NG) dianggap lebih baik untuk keberlanjutan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Rakhmawati 2022).

Tantangan utama yang muncul secara konsisten di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Barito Utara, adalah keterbatasan jumlah operator, kurangnya kompetensi teknis SDM, serta infrastruktur perangkat keras

yang belum memadai (Gonibala et al. 2024). Hal ini menegaskan bahwa transformasi digital memerlukan kesiapan ekosistem yang komprehensif.

Lebih lanjut, inovasi digital kini meluas ke sektor pendapatan daerah, seperti aplikasi *Si-Takir* di Palangka Raya untuk penertiban parkir (Adnan and Ahmad 2025). Pengambilan keputusan dalam ekosistem digital ini memerlukan akurasi data yang tinggi, serupa dengan pola pengambilan keputusan strategis di sektor industri lainnya (Fitriastuti 2026). Pada akhirnya, transparansi dan kemudahan akses informasi menjadi variabel kunci dalam menentukan kepuasan publik (Jabbar et al. 2026).

Pembahasan

Efektivitas implementasi sistem informasi dalam tata kelola keuangan daerah sangat ditentukan oleh korelasi antara kualitas teknologi dan persepsi pengguna. Berdasarkan pengujian empiris menggunakan model DeLone dan McLean, kualitas sistem dan kualitas informasi terbukti berpengaruh langsung terhadap kesuksesan implementasi SIMDA (Wahyuni 2021). Hal ini sejalan dengan kondisi di Kabupaten Bintan, di mana pemanfaatan sistem tersebut secara optimal telah membantu pemerintah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis berdasarkan data laporan keuangan yang akurat (Denvy Putri 2021). Temuan ini memperkuat teori bahwa ketika sebuah sistem informasi mampu menyajikan data yang andal dan mudah diakses, kepuasan pengguna akan meningkat, yang pada akhirnya mendorong keberhasilan organisasi secara menyeluruh (Igirisa et al. 2022).

Namun, di sisi lain, transisi kebijakan dari SIMDA menuju Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menghadirkan dilema antara stabilitas sistem dan tuntutan integrasi. Meskipun SIMDA Keuangan (khususnya versi 2.9.0.9) dinilai lebih stabil untuk operasional harian, transisi menuju SIPD atau SIMDA-Next Generation (SIMDA-NG) merupakan langkah esensial untuk memenuhi standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Rakhmawati 2022). Meskipun terdapat kendala pada masa transisi, implementasi SIPD di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah terbukti mampu memberikan dampak positif berupa otomatisasi manajemen dokumen anggaran yang mempercepat proses birokrasi dari perencanaan hingga pelaporan (Djafar et al. 2026). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan teknis pada awal penerapan merupakan bagian dari proses modernisasi tata kelola yang lebih transparan (Setiyani 2025).

Hambatan utama yang bersifat sistemik dalam transformasi digital ini terletak pada kesiapan ekosistem pendukung, terutama aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur. Di wilayah seperti Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, efektivitas sistem sering kali terhambat oleh keterbatasan jumlah operator serta kurangnya profisiensi teknis aparatur (Dirza Lestari and Abidin 2022; Gonibala et al. 2024). Kenyataan ini mengonfirmasi temuan di Sekretariat DPRD Surakarta, yang menekankan bahwa variabel kompetensi dan pelatihan secara signifikan menentukan kinerja pegawai dalam mengoperasikan sistem informasi (Irwanto et al. 2022). Oleh karena itu, adopsi teknologi seperti aplikasi *Si-Takir* di Palangka Raya maupun sistem keuangan nasional memerlukan sinergi antara kecanggihan perangkat lunak dengan peningkatan literasi digital pelaksananya (Adnan and Ahmad 2025).

Secara lebih luas, keberhasilan sistem informasi pemerintahan tidak hanya diukur dari sisi administratif, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pengambilan keputusan strategis dan transparansi publik. Pola dekarbonisasi dan keberlanjutan organisasi sangat bergantung pada data yang akurat untuk menentukan arah kebijakan (Fitriastuti 2026). Hal ini berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat, di mana transparansi layanan digital yang mudah diakses akan meningkatkan kepuasan publik dan memperkuat integritas tata kelola pemerintahan (Jabbar et al. 2026). Dengan demikian, integrasi

Analisis Hambatan Implementasi Simda Berbasis Akrual Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Kota Palangkaraya

teknologi digital yang inklusif menjadi kunci utama untuk meminimalkan hambatan teknis sekaligus memaksimalkan akuntabilitas pemerintahan daerah di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap berbagai studi kasus di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem informasi, baik melalui platform SIMDA maupun transisinya menuju SIPD, telah menjadi katalisator utama dalam mewujudkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola keuangan daerah. Transformasi ini bukan sekadar pergantian media dari manual ke digital, melainkan sebuah restrukturisasi birokrasi yang mampu mengotomatisasi proses perencanaan, pengawasan, hingga pelaporan keuangan menjadi lebih terintegrasi dan terstruktur.

Keberhasilan sistem ini secara empiris terbukti meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas laporan keuangan daerah, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya tingkat kepuasan pengguna dan tercapainya opini audit yang positif dari BPK di berbagai wilayah. Namun, efektivitas teknologi ini belum mencapai titik optimal secara merata. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kecanggihan perangkat lunak sering kali terbentur oleh realitas infrastruktur yang belum stabil dan keterbatasan kompetensi teknis sumber daya manusia (SDM). Transisi dari SIMDA menuju SIPD pun masih menyisakan tantangan besar, terutama terkait stabilitas server dan kebutuhan akan masa adaptasi yang lebih fleksibel bagi operator di daerah.

Pada akhirnya, keberhasilan adopsi sistem informasi pemerintahan tidak hanya bergantung pada kualitas sistem itu sendiri, tetapi pada kesiapan ekosistem pendukungnya. Penguatan infrastruktur jaringan dan pelatihan digital yang berkelanjutan bagi aparatur merupakan prasyarat mutlak agar inovasi teknologi ini tidak hanya berhenti pada fungsi administratif, tetapi mampu mendorong transparansi publik yang lebih luas. Sinkronisasi antar-platform menjadi agenda krusial di masa depan guna menciptakan integrasi data yang menyeluruh, yang pada gilirannya akan mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih inklusif dan akurat bagi pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muskhan, and Sabarudin Ahmad. 2025. "Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya Dalam Penertiban Juru Parkir Liar Perspektif Siyasa Syar' Iyah." 8:358–69.
- Arief, Assaf, and Muhammad Yunus Abbas. 2021. "Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)." *PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro* 8(1):1–6. doi:10.33387/protk.v8i1.1978.
- Denvy Putri, Raja Aulia. 2021. "ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN."
- Dirza Lestari, Indah, and M. Zainal Abidin. 2022. "ANALISIS KENDALA DAN EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA DINAS PRKPP KABUPATEN BARITO UTARA KALTENG Indah Dirza Lestari Pada Organisasi Pemerintah Khususnya Di Indonesia , Pemerintah Indonesia Berusaha Membuat S." 6(1):95–117.
- Djafar, Nurhayati, M. Rudin, and Muhammad Darma Halwi. 2026. "MANAJEMEN DOKUMEN ANGGARAN MELALUI APLIKASI SIPD PADA KANTOR BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH." 1(2):1–24.
- Fitriastuti, Fransisca. 2026. "Strategic Decision-Making for Greenomina Decarbonization Efforts at PT Pertamina (Persero) Strategic Decision-Making for Greenomina Decarbonization Efforts at PT Pertamina (Persero)." 33(1). doi:10.20476/jbb.v33i1.1593.
- Gonibala, Abdillah, Arifin Tahir, and William Indra S Mooduto. 2024. "JOURNAL OF ECONOMIC , BUSINESS AND ADMINISTRATION (JEBA) ANALYSIS OF

Analisis Hambatan Implementasi Simda Berbasis Akrual Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Kota Palangkaraya

- UTILIZATION OF THE REGIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (SIMDA) IN THE REGIONAL.” 5(3):131–44.
- Igirisa, Irawaty, Dewi Sartika, Rosman Ilato, Sukarman Kamuli, Universitas Negeri Gorontalo, and Buol Regency. 2022. “Implementation of Local Management Information System (SIMDA) in Quality Improvement of Financial Report of Buol Regencial Government.” 35–39. doi:10.32996/bjps.
- Irwanto, Siti Nurlela, and Agni Astungkara. 2022. “Pengaruh Penerapan SIMDA Keuangan , Kompetensi Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Di Sekretariat DPRD Surakarta.” 5(1):935–40.
- Jabbar, Abdul, Novita Dwi Adiningrum, Rizki Nor Amelia, and Nanto Sriyanto. 2026. “Gender and Transparency Analysis in Public Service : Integrating Public Satisfaction and Corruption Perception at Balai Litbang Agama of Semarang Gender and Transparency Analysis in Public Service: Integrating Public Satisfaction and Corruption Perceptio.” 33(1). doi:10.20476/jbb.v33i1.1602.
- Jati, Budhi Purwanto. 2019. “Admin2,+Journal+manager,+1.+Budhi+PJ_AA+YKPN.” 21(1):1–14.
- Liza Maharani, Bunga. 2025. “IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAKEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA METRO.”
- Ole, Halens Ryanlie. 2004. “Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara).” 1–15.
- Pidang, Maria Margaretha, Aris Sunarya, Sri Reokminiati, and Universitas Soetomo Surabaya. 2025. “Evaluasi Implementasi Aplikasi SIMDA Pendapatan Dalam Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Di Kabupaten Mahakam Ulu.” 01(02):171–83.
- Rakhmawati, Intan. 2022. “ANALISA SIMDA-NEXT GENERATION (SIMDA-NG).” 7(1). doi:10.29303/jaa.v7i1.168.
- Setiyani, Niken Amalina. 2025. “Efektivitas Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Indonesia.”
- Triwahyuni, Fitria, and Yuli Fatmawati. 2024. “ANALISIS TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH REPUBLIK INDONESIA (SIPD RI) UNTUK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.” 4(5):58–71.
- Wahyuni, Trisacti. 2021. “Uji Empiris Model Delone Dan Mclean Terhadap Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda).”